

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, aliran dana tidak lagi terikat oleh batas negara, dan permintaan untuk transparansi informasi keuangan semakin meningkat, baik dari pengguna laporan keuangan di dalam maupun di luar negeri. Pelaku bisnis dan organisasi sektor publik merespons perkembangan ini dengan menyusun laporan keuangan. Organisasi di sektor publik juga dihadapkan pada tuntutan efisiensi biaya ekonomi dan sosial dalam aktivitas mereka. Semua tuntutan ini mendorong pengembangan akuntansi, khususnya dalam konteks baru yang dikenal sebagai akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik terkait erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Wilayah publik mencakup berbagai jenis organisasi, seperti badan pemerintahan, perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang mengalami ketidakstabilan ekonomi, terutama di sektor keuangan. Meskipun beberapa perusahaan menunjukkan peningkatan pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi belum dapat menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Masyarakat merespons permasalahan ekonomi dengan membentuk organisasi nirlaba. Organisasi ini bertujuan memberikan layanan kepada

masyarakat dan memerlukan sumber dana, yang umumnya diperoleh melalui sumbangan pihak ketiga tanpa harapan pengembalian manfaat ekonomi sebanding. Karena sifat khusus ini, organisasi nirlaba melibatkan transaksi, siklus operasional, manajemen keuangan, akuntansi, dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan kepada pengguna.

Organisasi nirlaba dalam masyarakat fokus pada kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Mereka berkontribusi pada berbagai bidang seperti pendidikan, agama, panti asuhan, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur dan memaksa yayasan, termasuk panti asuhan, yang merawat anak-anak yatim piatu. Pengelolaan panti asuhan biasanya dilakukan oleh lembaga sosial yang tidak mencari keuntungan, bertanggung jawab dalam merawat, mendidik, dan menampung anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan dari orang tua mereka.

Panti Asuhan yang merupakan "Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)" adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bertujuan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Penyelenggaraan ini dilakukan oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 tahun 2010. Sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak, Panti Asuhan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan kepada anak-anak yang membutuhkan. Tujuan utamanya adalah memberikan

lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang mungkin tidak memiliki keluarga atau kondisi kehidupan yang sulit.

Salah satunya LKSA Al-Hasan Jombang merupakan panti asuhan yang memiliki kurang lebih 110 anak asuh, sehingga laporan keuangan sangat penting digunakan sebagai informasi pelaporan pada para donatur, calon donatur serta laporan kepada dinas terkait. Dengan tidak adanya laporan keuangan yang rinci dan transparansi sehingga bisa menurunkan minat para donatur karena tidak adanya kejelasan dari panti untuk mengenaai laporan keuangan dengan lengkap.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak oleh Panti Asuhan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, serta pendampingan psikososial. Selain itu, Panti Asuhan juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang berada di bawah perlindungannya. Penting untuk mencatat bahwa regulasi dan definisi terkait panti asuhan dapat bervariasi antar negara, dan informasi di atas berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 tahun 2010 pada pengetahuan saya hingga Januari 2022. Jika terdapat perubahan peraturan atau definisi lebih lanjut, disarankan untuk merujuk pada sumber resmi yang terkini.

Sebagai sebuah entitas nirlaba, LKSA atau Panti Asuhan mendapatkan dana dalam bentuk sumbangan dari para donatur, zakat, serta lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan mereka. Meskipun penggunaan dana tidak membatasi distribusi jumlah yang diterima, panti asuhan memiliki tanggung jawab untuk

menyusun laporan sebagai bentuk tanggung jawab dari transaksi yang telah dilakukan. Laporan terkait juga berfungsi sebagai alat pendukung keputusan bagi berbagai organisasi (Purba, et al., 2022). Secara umum, laporan keuangan organisasi laba dan nirlaba memiliki perbedaan, terutama dalam format laporan keuangan itu sendiri. Laporan arus kas organisasi nirlaba harus mencakup sumber dana dan jumlah sumbangan dari berbagai pihak untuk diperlihatkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Saat ini, organisasi nirlaba di Indonesia semakin menyadari pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang baik, yang seharusnya menjadi ukuran utama dari kepercayaan dan transparansi perusahaan (Tinungki & Pusung, 2018).

Organisasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang tercermin dalam penggolongan menjadi dua jenis utama, yaitu organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non laba. Perbedaan utama antara keduanya sangat jelas terlihat dari tujuan masing-masing. Organisasi berorientasi laba memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan demi kepentingan pemilik dan pemegang saham. Sebaliknya, menurut Afridayani et al. (2022), organisasi non laba memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas di dalam lingkup organisasi non laba tersebut, tanpa berfokus pada pencapaian laba.

Akuntansi tidak hanya digunakan dalam praktik bisnis, melainkan juga dalam berbagai aspek kehidupan. Pengelompokan data, pencatatan, serta perencanaan anggaran adalah bagian dari sistem akuntansi. Tanpa disadari, semua sektor memerlukan konsep akuntansi, termasuk organisasi nirlaba seperti yayasan yang tentu saja membutuhkan dukungan akuntansi. Yayasan, sebagai contoh

organisasi nirlaba, juga mengandalkan jasa akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan dan meningkatkan pengawasan mutu yayasan tersebut. Namun, karena sifat yayasan atau organisasi nirlaba berbeda dengan entitas bisnis lainnya, akuntansi yang digunakan juga memiliki perbedaan. Sementara tujuan utama yayasan adalah memberikan layanan kepada masyarakat, entitas bisnis bertujuan utamanya untuk mencari keuntungan (profit).

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, terutama dalam cara mereka memperoleh sumber daya untuk melaksanakan aktivitas operasional. Perbedaan utama terletak pada pendanaan, di mana organisasi nirlaba mendapatkan sumber daya dari anggota dan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan kembali. Dampak dari karakteristik ini adalah munculnya transaksi khusus dalam organisasi nirlaba, seperti penerimaan sumbangan (Chenly Ribka, 2013).

Laporan keuangan organisasi nirlaba juga memiliki perbedaan dengan laporan keuangan organisasi bisnis pada umumnya, terutama dalam bentuk laporan keuangan. Namun, seringkali orang kurang tahu tentang bentuk laporan keuangan organisasi nirlaba, seperti gereja atau organisasi nirlaba lainnya. Terdapat anggapan umum bahwa laporan keuangan pada setiap organisasi, baik laba maupun nirlaba, esensinya sama. Laporan keuangan organisasi nirlaba mencakup informasi tentang dana atau sumbangan dari berbagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada pihak internal dan eksternal. Sayangnya, di Indonesia, organisasi nirlaba cenderung lebih memprioritaskan kualitas program daripada memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal, sistem

pengelolaan keuangan yang baik dianggap sebagai indikator utama akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga.

Menurut PSAK 1, Laporan keuangan yaitu representasi terstruktur dari kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Maksud dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang situasi keuangan, kinerja finansial, serta aliran kas suatu entitas agar para pengguna laporan dapat menggunakan data tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, laporan keuangan juga mencerminkan akuntabilitas manajemen terhadap pemanfaatan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.

Menurut IAI (2015), entitas nirlaba memiliki beberapa ciri khas, termasuk produksi barang dan jasa tanpa tujuan untuk mengakumulasi laba, sumber daya diperoleh dari pemberi sumber daya tanpa harapan pengembalian atau keuntungan ekonomi seimbang, dan jika entitas nirlaba mencapai keuntungan, keuntungan tersebut tidak didistribusikan kepada pendiri atau pemilik entitas, menunjukkan ketiadaan kepemilikan seperti yang umumnya terjadi. Entitas nirlaba juga tidak memiliki bentuk kepemilikan yang dapat diperdagangkan atau mencerminkan pembagian sumber daya saat pembubaran atau likuidasi.

Sebelum tahun 2020, entitas berorientasi nonlaba, menurut IAI, menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Namun, mulai 1 Januari 2020, ISAK 35 diperkenalkan untuk memberikan kejelasan terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan secara keseluruhan untuk pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, dengan pengecualian tertentu

yang diuraikan dalam ISAK 35. Perbedaan antara PSAK 45 dan ISAK 35 terletak pada pengklasifikasian aset neto, di mana aset neto terikat secara permanen dan aset neto terikat secara temporer digabung menjadi aset neto dengan dan tanpa pembatasan.

Sebagai organisasi nonlaba, entitas nirlaba harus menerapkan Konsep Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan. Menurut ISAK No. 35, entitas nonlaba diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan, meskipun banyak pelaku ekonomi belum sepenuhnya mengejar tujuan laporan keuangan karena alasan waktu, biaya, dan tenaga.

Studi terdahulu, seperti penelitian oleh Sukma Diviana, Azi Siswanto, Rangga Putra Ananto, dan lainnya pada 2020, menunjukkan bahwa beberapa entitas nirlaba, termasuk Masjid Baitul Haadi, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ISAK No. 35 dalam penyajian laporan keuangan. Penelitian lain oleh Sahala Purba, et al. (2021) dan Baitus Salamah, et al. (2023) juga mengungkapkan ketidaksesuaian laporan keuangan entitas nonlaba, seperti Panti Asuhan Kasih Murni dan Pondok Pesantren Az-Zabur Kaje, dengan standar akuntansi yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Hasan (LKSA Al-

Hasan) dengan ISAK 35, mengingat anggapan umum bahwa laporan keuangan entitas berorientasi laba dan nirlaba adalah sama.

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya dan menyadari urgensinya dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba, penulis menentukan judul penelitian ini: **“Analisis Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada LKSA Al – Hasan Jombang)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, rumusan masalah topik penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan laporan keuangan pada LKSA Al - Hasan dengan kesesuaian ISAK No. 35 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merinci pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan laporan keuangan pada LKSA Al - Hasan telah mematuhi ketentuan ISAK No. 35 yang mengatur penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini, terutama dalam konteks akuntansi akan memberikan kontribusi pada pemahaman, khususnya dalam hal rekonstruksi penyajian laporan keuangan LKSA Al - Hasan sesuai dengan ISAK No. 35. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas basis pengetahuan dengan informasi yang diperoleh, serta

dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan atau perbandingan pada penelitian terkait lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pandangan bagi pihak institusi dalam menyusun laporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ISAK No. 35.